

# RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDRAP TAHUN 2014-2018





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

JLN. Harapan Baru Blok B Nomor 11, Kompleks SKPD-Poros BuaE

**SURAT PENETAPAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara, penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tentang Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 sampai dengan 2025 (Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2007);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2014);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2014-2018**

Pasal 1

- 1) Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 yang selanjutnya disebut Renstra tahun 2014-2018 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Dinas untuk periode 5 (lima) tahun yang mulai berlaku pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
- 2) Renstra tahun 2014-2018 sebagaimana ayat 1) terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014-2018
BAB VII	PENUTUP

Pasal 2

- 1) Renstra Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan disegala bidang pembangunan.
- 2) Renstra Tahun 2014-2018 menjadi Pedoman bagi setiap Bidang Lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyusun Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Dinas dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulappa  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
Kepala Dinas Cipta Karya & Tata Ruang  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dra. Hj. ARYANI T., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. : 19611101 198603 2 008

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang untuk diketahui
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
5. Pertinggal

## **KATA PENGANTAR**

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014-2018. Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018.

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014-2018 merupakan arahan mandat Undang-undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta rincian program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2018. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014-2018 dapat menjadi acuan bagi setiap Bidang dan Unit lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai tahun 2014 sampai tahun 2018.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan Program, Rencana Kerja serta Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Batulappa, Oktober 2014  
Kepala Dinas Cipta Karya & Tata Ruang  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dra. Hj. ARYANI T., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. : 19611101 198603 2 008

# DAFTAR ISI

SURAT PENETAPAN .....	II
KATA PENGANTAR .....	IV
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR .....	VIII
DAFTAR ISTILAH .....	IX
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
2.1.1 TUGAS POKOK DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG .....	10
2.1.2 FUNGSI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG.....	30
2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG.....	31
2.2 SUMBER DAYA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG .....	33
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG .....	34
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.....	45
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	51

3. 1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.....	51
3. 2	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014-2018.....	53
3. 3	TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI.....	57
3. 4	TELAAHAN RTRW 2012-2032 .....	57
3. 5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	62
	BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	64
4. 1	VISI DAN MISI .....	64
4. 2	TUJUAN DAN SASARAN .....	65
4. 3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	67
	BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	75
5.1	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	75
5.2	INDIKATOR KINERJA .....	76
5.3	PENDANAAN INDIKATIF.....	76
	BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	103
6. 1	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	103
	BAB 7 PENUTUP.....	107

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat .....	33
Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan .....	33
Tabel 2. 3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan.....	34
Tabel 2. 4 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan .....	36
Tabel 2. 5 Jumlah Yang Terlayani Infrastruktur Permukiman .....	37
Tabel 2. 6 Capaian Target Sasaran Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidrap Tahun 2011-2013 .....	40
Tabel 5. 1 Rincian Alokasi Dana Per tahun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .....	79
Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 .....	80
Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	104

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Distribusi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.....	45
Gambar 3.2 Perbandingan Pembiayaan Infrastruktur Air Bersih Antara DAU & DAK .....	46
Gambar 3.3 Perbandingan Biaya Infrastruktur Bidang Permukiman Tahun 2009 dan 2010 .....	49
Gambar 3. 4 Perbandingan Biaya Infrastruktur Bidang Kebersihan dan Keindahan dan Penataan Ruang Tahun 2009 dan 2010.....	50
Gambar 3. 5 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah .....	60



## DAFTAR ISTILAH

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
PAMSIMAS	: Pembangunan Air Minum Berbasis Masyarakat
RTBL	: Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RUTRK	: Rencana Umum Tata Ruang Kawasan
RDTRK	: Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Dinas
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
UU	: Undang-undang



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Terbentuknya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2011 sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap didasarkan pada Perda Bupati Sidrap No. 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang diharapkan meningkatkan kinerja Pemda Kab. Sidrap khususnya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam urusan perumahan dan penataan ruang permukiman.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2014-2018 yakni :

***“Terwujudnya Sidenreng Rappang yang Maju dan Terkemuka bersama masyarakat Religius dengan Pendapatan meningkat dua kali lipat”***

maka dalam menetapkan Visi Dinas Cipta karya dan Tata Ruang mengacu pada visi tersebut diatas. Selain itu yang menjadi bahan rujukan adalah Misi Pemerintah Kabupaten Sidrap yakni:

- 1) *Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan;*
- 2) *Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM;*
- 3) *Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan;*
- 4) *Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah;*
- 5) *Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif;*
- 6) *Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan*

*Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018*

*Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.*

Dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 terdapat kebijakan umum pembangunan yang saling terkait dan bersinergi satu sama lain. Ada beberapa kebijakan yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu Meningkatkan dan Membangun Infrastruktur yang membuka akses antar wilayah, Membangun prasarana dasar infrastruktur permukiman, Meningkatkan Cakupan layanan Air Bersih dan Sanitasi, Penataan Kawasan Kumuh, Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terpadu, dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Private yang efektif dan efisien. Dari kebijakan ini akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi pembangunan di Kabupaten Sidrap Tahun 2014-2018.

Program dan kegiatan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan serta penataan ruang permukiman. Hal ini membutuhkan perencanaan yang strategis dan terintegrasi dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat. Terbangunnya infrastruktur memberi peran yang sangat penting, karena memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya

konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh konsisi pasar.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan penataan ruang. Karena dalam penataan ruang khususnya program pemanfaatan ruang pada dasarnya harus sejalan dengan arah kebijakan, strategi, dan program dalam perencanaan pengembangan. Namun dalam kenyataannya antara penataan ruang dan perencanaan pengembangan seringkali tidak sinergi yang kemudian berdampak tidak adanya kejelasan arah pengembangan dan pembangunan kota.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi, Uraian tugas dan Tata kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidenreng Rappang;
18. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014- 2018 sebagai pedoman dalam menyusun program kerja yang lebih terarah dan sistematis selama 5 (lima) tahun. Hal ini disesuaikan dengan program kerja dari pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga Renstra merupakan penjabaran kebijakan/program RPJMD, penyiapan acuan bagi rencana kerja SKPD, penyiapan kerangka evaluasi kinerja bagi SKPD.

Sedang tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menetapkan prioritas program kerja/kegiatan dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan pemerintah sehingga konsistensi perencanaan dalam perwujudan capaian kinerja SKPD dapat terbangun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renstra.

##### **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra.

##### **BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

##### **BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan kesejahteraan sosial yang akan direncanakan.



## **BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

## **BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2018 sesuai target capaian kinerja pada Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

## **BAB 7 PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Tahun 2014-2018





## BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Perda Bupati Sidrap No. 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah mengamanatkan pembentukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai SKPD Teknis yang memiliki tugas pokok pembangunan di bidang keciptakaryaan dan tata ruang, serta tugas-tugas pembantuan lainnya yang diberikan oleh Bupati berdasarkan bidang tugasnya.

#### 2.1.1 Tugas Pokok Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidenreng Rappang memiliki Tugas pokok dan fungsi jabatan sebagai berikut:

##### 1. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Tugas Pokok : Memimpin Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, menjalin dan mengkoordinasikan Bidang-bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan, urusan permukiman, tata ruang dan bangunan, kebersihan dan keindahan dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan membuat laporan secara berkala.

Fungsi : - Penyelenggaraan dan Pembinaan Urusan Kesekretariatan  
- Penyelenggaraan dan pembinaan urusan Permukiman.

*Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018*

- Penyelenggaraan dan Pembinaan Urusan Tata Ruang dan bangunan.
- Penyelenggaraan dan Pembinaan Urusan Kebersihan dan Keindahan.
- Penyelenggaraan dan Pembinaan Terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokoknya.

## 2. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

**Tugas Pokok** : Mengkaji dan merumuskan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sekretariat, menghimpun dan mengkompilasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja dari setiap bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang, menyelenggarakan Penatausahaan dan Ketatalaksanaan urusan Perencanaan Umum Dinas, urusan Keuangan, urusan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat dan membuat laporan secara berkala.

**Fungsi** : - Penyelenggaraan dan Penatausahaan Urusan Perencanaan  
 - Penyelenggaraan dan Penatausahaan Urusan Keuangan  
 - Penyelenggaraan dan Penatausahaan Urusan Umum dan Kepegawaian.

## 3. Kepala Sub. Bagian Perencanaan

**Tugas Pokok** : Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian Perencanaan. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Sub. Bagian Keuangan serta Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaia, membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas pekerjaan di lingkup Sub. Bagian. Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan untuk petunjuk teknis perencanaan Dinas, melaksanakan pelayanan Administrasi dan Ketatalaksanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Sub. Bagian Perencanaan, serta membuat Laporan secara berkala.

- Uraian Tugas : - Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Sub. Bagian Perencanaan
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian Perencanaan.
  - Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian serta Dokumen Penetapan Kinerja Bagian dengan Sekretaris Dinas, Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup Sub. Bagianya.
  - Membantu Sekretaris Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub. Bagianya.
  - Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian.
  - Melaksanakan Pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Tugas Pekerjaan Sub. Bagian Perencanaan.
  - Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP Sub. Bagian.
  - Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perumusan Visi, Misi, Renstra dan Renja Dinas.
  - Mengkoordinasikan, menghimpun dan memverifikasi Renstra dan Renja dari masing-masing Bidang.
  - Mengumpulkan, mengolah dataa dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Perencanaan Dinas.
  - Menghimpun, mengklasifikasi dan menyusun data statistik Perencanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
  - Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
  - Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian secara berkala.
  - Membantu Sekretaris Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Perencanaan.

- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP3.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Kepala Sub. Bagian Keuangan

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian Keuangan Membantu Sekretaris Dinas dalam menghimpun Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran serta Dokumen Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Sub. Bagian Perencanaan serta Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, menjalin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup Sub. Bagian Keuangan. Melaksanakan urusan penatausahaan Administrasi Keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas, melakukan pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub. Bagian serta membuat Laporan secara berkala.

**Uraian Tugas :**

- Menyiapkan dan merumuskan Rancangan Rencana Strategis Sub. Bagian Keuangan
- Menyiapkan dan merumuskan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Sub. Bagian Keuangan.
- Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian dengan Sekretaris Dinas, Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Melaksanakan pengkajian dan perumusan SOP pelaksanaan Tugas Pekerjaan Sub. Bagian.
- Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP Sub. Bagian.
- Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja di lingkup Sub. Bagian Keuangan.
- Membantu Sekretaris dalam Pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub. Bagian Keuangan.
- Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan Dokumen Keuangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Sub. Bagian Keuangan.

- Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
- Menghimpun dan memverifikasi terhadap dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dinas.
- Melaksanakan telaahan staf kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Membantu Sekretaris dalam dalam rangka menghimpun dan merumuskan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Sub. Bagian.
- Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian secara berkala.
- Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Keuangan.
- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP3.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 5. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, membantu Sekretaris Dinas dalam menghimpun Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran satuan kerja lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Sub. Bagian Keuangan. Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas. Menyiapkan bahan penbyusunan rencana kebutuhan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai dan Penatausahaan kepegawaian lingkup dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub. Bagian serta membuat laporan secara berkala.

**Uraian Tugas :**

- Menyiapkan dan merumuskan Rancangan Rencana Strategis Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Menyiapkan dan merumuskan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan



Kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Dinas, Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Kepala Sub. Bagian Keuangan.

- Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup Sub. Bagiaannya.
- Melaksanakan Pengkajian dan perumusan SOP Sub. Bagian.
- Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP Sub. Bagian.
- Mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup Sub. Bagian.
- Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan tugas dinas dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkup Dinas.
- Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sub., Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Mengadakan pembinaan dan poengendalian terhadap tugas Sub. Bagian.
- Menghimpun, mengolah, menbggandakan dan menyimpan dokumebn laporan kepegawaian, inventaris barang dan perlengkapan serta urusan Rumah Tangga Dinas Secara rapi.
- Membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan-urusan barang inventaris dan kepegawaina dinas.
- Menghimpun dan mengkomplikasi dokumen kepegawaian, surat menyurat dan inventaris barang dari bidang lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- Menghimpun, memverifikasi dan memelihara dokumen dan informasi kepegawaian, Surat menyurat dan barang inventaris, serta perpustakaan Dinas.
- Mengola administrasi kepegawaian dan barang inventaris serta perpustakaan Dinas.
- Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat, dokumen barang inventaris dan kepegawaian Dinas.
- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan inventaris barang Dinas.
- Melaksanakan pengurusan Administrasi Perjalanan Dinas.
- Membuat telaahan staf kepada Pimpinan sesuai dengan Bidang tugasnya.

- Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Sub. Bagian.
- Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub. Bagian secara berkala.
- Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP3.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6. Kepala Bidang Permukiman

**Tugas Pokok :** Mengkaji dan merumuskan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, membina dan mengkoordinir kepala seksi di lingkup Bidang Permukiman, membuat pedoman penyelenggaraan Tugas Bidang, Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan penataan dan penyehatan lingkungan, pembangunan perumahan dan permukiman serta pengkoordinasian Perencanaan dan Pengawasan Permukiman, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.

**Fungsi :**

- Penyelenggaraan dan Pembinaan Penataan dan Penyehatan Lingkungan
- Penyelenggaraan dan Pembinaan pembangunan Perumahan dan Permukiman
- Penyelenggaraan dan Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Permukiman.

## 7. Kepala Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan, Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Permukiman, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman. Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup seksi, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen Penataan dan Penyehatan Lingkungan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-

tugas pada Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan, serta membuat laporan secara berkala.

- Uraian Tugas : - Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan.
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan.
  - Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan dengan Kepala Bidang Permukiman dan Kepala Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman.
  - Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup seksinya.
  - Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup seksinya.
  - Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan
  - Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas seksi.
  - Melaksanakan Pengkajian dan Perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Penataan dan Penyehatan Lingkungan.
  - Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi Pelaksanaan SOP Seksinya.
  - Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi.
  - Mengevaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi secara Berkala.
  - Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan penyehatan Lingkungan.
  - Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP3.
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 8. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Tugas Pokok : Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Permukiman, Kepala Seksi penataan dan Penyehatan Lingkungan serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman. Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup seksi, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen Perumahan dan Permukiman, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembangunan dan Permukiman, serta membuat laporan secara berkala.

- Uraian Tugas : - Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan.
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman
  - Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Raancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Kepala Bidang Permukiman saksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman.
  - Membina dan mengkoorinir tugas-tugas kerja di lingkup seksinya.
  - Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup seksinya.
  - Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
  - Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas seksi
  - Melaksanakan Pengkajian dan Perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
  - Melaksanakan pemantauan, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP Seksinya.
  - Melaksanakan telahan staf dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
  - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi.
  - Mengevaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi secara berkala.

- Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 9. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman, Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Permukiman, Kepala Seksi penataan dan Penyehatan Lingkungan serta Kepala Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman. Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup seksi, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen Perencanaan dan pengawasan Permukiman, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman, serta membuat laporan secara berkala.

**Uraian Tugas :**

- Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman.
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman.
- Mengkoordinasikan Rncangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan pemukiman dengan Kepala Bidang Permukiman dan Kepaa Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan serta Kepala Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- Membina dan mengkoordinir tugas-tugas di lingkup fungsinya
- Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup seksinya.
- Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Anggaran Kerja Satuan Kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman.
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan yugas seksi.

- Melaksanakan pengkajian dan Perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Permukiman
- Melaksanakan pemantauan, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP Seksinya.
- Melaksanakan telahan staf dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi.
- Mengevaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi secara berkala.
- Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman
- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 10. Kepala Bidang Tata Ruang

**Tugas Pokok :** Mengkaji dan merumuskan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, membina dan mengkoordinir kepala seksi di lingkup Bidang Tata Ruang, membuat pedoman penyelenggaraan Tugas Bidang, Menyenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan, Perizinan serta pengkoordinasian Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat Laporan secara berkala.

**Fungsi :**

- Penyelenggaraan dan Pembinaan Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan.
- Penyelenggaraan dan Pembinaan Perizinan.
- Penyelenggaraan dan Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang

#### 11. Kepala Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan,

Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Tata Ruang, Kepala Seksi Perisinan serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang. Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup seksi, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan, serta membuat laporan secara berkala.

- Uraian Tugas : - Menyiapkan Rancangan Rencana Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan.
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan
  - Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Kepala Perizinan Serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang
  - Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup seksinya.
  - Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup seksinya.
  - Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan.
  - Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Kepada bawahan sesuai dengan tugas seksi.
  - Melaksanakan Pengkajian dan Perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan.
  - Melaksanakan pemantauan, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP Seksinya.
  - Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi.
  - Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi secara berkala.
  - Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan.

- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 12. Kepala Seksi Perizinan

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perizinan, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Tata Ruang, Kepala Seksi Analisis Tata Ruang serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang. Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup seksi perizinan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen Perizinan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perizinan, serta membuat laporan secara berkala.

**Uraian Tugas :**

- Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Seksi Perizinan.
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perizinan.
- Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Perizinan dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan dan Kepala Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang.
- Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup seksinya.
- Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup seksinya.
- Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perizinan.
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas seksi.
- Melaksanakan pegkajian dan perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Perizinan.
- Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksinya.
- Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi.



- Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perizinan secara berkala.
- Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan.
- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 

### 13. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Tata Ruang, Kepala Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan serta Kepala Seksi Perizinan. Menjalinkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup seksi Perencanaan dan pengawasan Tata Ruang, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang, serta membuat laporan secara berkala.

- Uraian Tugas :**
- Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang.
  - Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang.
  - Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan dan Kepala Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan serta Kepala Seksi Perizinan.
  - Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup seksinya.
  - Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup seksinya.
  - Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas seksi.
- Melaksanakan pegkajian dan perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang.
- Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksinya.
- Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi.
- Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang secara berkala.
- Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang.
- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 14. Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan

**Tugas Pokok :** Mengkaji dan merumuskan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, mebina dan mengkoordinir kepala seksi di lingkup Bidang Kebersihan dan Keindahan, membuat pedoman penyelenggaraan Tugas Bidang, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kebersihan dan Keindahan Pertamanan dan Pemakaman, serta Pembinaan Penerangan Lampu Jalana, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.

**Fungsi :**

- Penyelenggaraan dan Pembinaan Kebersihan dan Keindahan
- Penyelenggaraan dan Pembinaan Pertamanan dan Pemakaman
- Penyelenggaraan dan Pembinaan Penerangan Lampu Jalan.

## 15. Kepala Seksi Kebersihan

**Tugas Pokok** : Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Kebersihan, Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan, Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman serta Kepala Seksi Penerangan Lampu Jalan. Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup seksi kebersihan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen Kebersihan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kebersihan, serta membuat laporan secara berkala.

**Uraian Tugas** :

- Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Seksi Kebersihan.
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Kebersihan.
- Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Kebersihan dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan dan Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakman sesrta Kepala Seksi Penerangan Lampu Jalan.
- Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup seksinya.
- Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup seksinya.
- Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Kebersihan.
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas seksi.
- Melaksanakan pegkajian dan perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Seksi Kebersihan.
- Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksinya.
- Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi.
- Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Kebersihan secara berkala.

- Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Kebersihan.
- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 16. Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Pertamanan dan Pemakaman, Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan, Kepala Seksi Kebersihan serta Kepala Seksi Penerangan Lampu Jalan. Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup seksi, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen Pertamanan dan Pemakaman, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pertamanan dan Pemakaman, serta membuat laporan secara berkala.

**Uraian Tugas :**

- Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Pertamanan dan Pemakaman dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan dan Kepala Seksi Kebersihan serta Kepala Seksi Penerangan Lampu Jalan.
- Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup seksinya.
- Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup seksinya.
- Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas seksi.
- Melaksanakan pegkajian dan perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksinya.

- Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi.
- Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Pertamanan dan Pemakaman secara berkala.
- Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 17. Kepala Seksi Penerangan Lampu Jalan

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Penerangan Lampu Jalan, Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan, Kepala Seksi Kebersihan serta Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman. Menjalinkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup seksi, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen Penerangan Lampu Jalan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penerangan Lampu Jalan, serta membuat laporan secara berkala.

**Uraian Tugas :**

- Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Seksi Penerangan Lampu Jalan.
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Penerangan Lampu Jalan.
- Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Penerangan Lampu Jalan dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan dan Kepala Seksi Kebersihan serta Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup seksinya.
- Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup seksinya.
- Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Penerangan Lampu Jalan.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas seksi.
- Melaksanakan pegkajian dan perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Seksi Penerangan Lampu Jalan.
- Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksinya.
- Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi.
- Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Seksi Penerangan Lampu Jalan secara berkala.
- Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Lampu Jalan.
- Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 18. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran

**Tugas Pokok :** Mengkaji dan merumuskan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja UPTD, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, membina dan mengkoordinir Kepala Tata Usaha UPTD, membuat pedoman penyelenggaraan Tugas UPTD, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan UPTD, serta Pembinaan UPTD, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, serta membuat laporan secara berkala.

**Uraian Tugas :** - Penyelenggaraan dan Pembinaan UPTD Pemadam Kebakaran.

#### 19. Kepala Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran

**Tugas Pokok :** Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja UPTD Pemadam Kebakaran, dan mengkoordinasikan dengan Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Dinas.

Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup UPTD Pemadam Kebakaran, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen UPTD Pemadam Kebakaran, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Pemadam Kebakaran, serta membuat laporan secara berkala.

- Uraian Tugas : - Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis UPTD Pemadam Kebakaran.
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja UPTD Pemadam Kebakaran.
  - Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja UPTD Pemadam Kebakaran dengan Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Sekretaris Dinas.
  - Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup UPTD Pemadam Kebakaran.
  - Membantu Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup UPTD Pemadam Kebakaran.
  - Melaksanakan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja UPTD Pemadam Kebakaran.
  - Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas UPTD Pemadam Kebakaran.
  - Melaksanakan pegkajian dan perumusan SOP Pelaksanaan Tugas Pekerjaan UPTD Pemadam Kebakaran.
  - Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP UPTD Pemadam Kebakaran.
  - Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran.
  - Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja UPTD Pemadam Kebakaran secara berkala.
  - Membantu Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran.
  - Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **2.1.2 Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang;
4. dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang;
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
7. Pelaksanaan fasilitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur keciptakarya di perkotaan dan perdesaan;
8. Pengembangan sistem informasi penataan ruang daerah;
9. Pemberian izin dalam rangka pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pemanfaatan ruang;
10. Pembangunan dan pemeliharaan gedung – gedung asset daerah, pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah asset Pemerintah Daerah;
11. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukannya;
12. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air bersih/air minum, air limbah domestik (sanitasi), drainase, jalan lingkungan;
13. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air;
14. Penyelenggaraan pembagunan prasarana dan sarana air minum sanitasi, drainase lingkungan, jalan lingkungan;
15. Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan air bersih perdesaan;



16. Penyelenggara pengelolaan persampahan/kebersihan mulai dari tahap penampungan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan, pembuangan akhir sampah;
17. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
18. Pelaksanaan tugas Pencegahan Kebakaran Pemadaman Kebakaran, dan Penyelamatan Jiwa dan ancaman kebakaran serta bencana lainnya.
19. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Sekretaris Daerah

### **2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

Adapun struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
2. Sekretaris:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Permukiman
  - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman
  - b. Kepala Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan
  - c. Kepala Seksi Pembangunan, Perumahan dan Permukiman
4. Bidang Tata Ruang:
  - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang
  - b. Kepala Seksi Perizinan
  - c. Kepala Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan
5. UPTD Pemadam Kebakaran:
  - a. Ka. Tata Usaha



## 2.2 Sumber Daya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pegawai pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 38 orang laki-laki dan 21 Perempuan seperti pada Tabel 2.2

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	-	1	1
2.	III	2	2	4
3.	IV	9	5	14
4.	Staf	27	13	24
<b>Jumlah</b>		38	21	39

Sementara kondisi pegawai berdasarkan golongan, yang terbanyak adalah golongan III sebanyak 32 orang, sementara yang terkecil adalah Golongan IV sebanyak 2 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	8	1	9
2.	II	14	2	16
3.	III	16	16	32
4.	IV	-	2	2
<b>Jumlah</b>		38	21	59

Dalam hal pendidikan dari 59 orang pegawai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdapat 17 orang lulusan S2 dari berbagai jurusan, 16 orang S1, dan tidak ada sarjana muda. Sementara yang berpendidikan SMA ke bawah terdapat 6 orang

Tabel 2. 3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	4	-	4
2.	SLTP	4	1	5
3.	SLTA	13	2	15
4.	Sarjana Muda	1	-	1
5.	Strata 1 (S1)	14	15	29
6.	Strata 2 (S2)	2	3	5
<b>Jumlah</b>		38	21	59

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat menyebabkan upaya pengelolaan penataan ruang semakin berat dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan diantaranya peningkatan angka kemiskinan perkotaan, degradasi pelayanan publik, peningkatan kerawanan sosial, dan konflik pemanfaatan ruang seperti konflik antara kawasan ruang terbuka hijau dan permukiman.

Sebuah paradigma baru dalam penataan ruang adalah konsep pengembangan kota yang berkelanjutan. Kota yang berkelanjutan secara umum didefinisikan sebagai pengembangan kota yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama.

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan tujuan

terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya buatan bagi kesejahteraan manusia.

Penataan ruang permukiman merupakan bagian dari penataan ruang suatu wilayah yang harus memperhatikan potensi dan kendala wilayah. Hal ini sangat penting mengingat karakter dan budaya suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya.

Selain itu penataan ruang suatu wilayah merupakan acuan dalam melaksanakan pembangunan yang teratur,bersinergi, dan efisiensi.Penataan ruang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflikpemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikanpada masyarakat luas.

Selain urusan penataan ruang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengemban tugas membidangi urusan perumahan, utamanya prasarana pendukung/infrastruktur permukiman. Keberadaan infrastruktur dalam menjaga lingkungan hidup permukiman yang berkelanjutan sangat penting. Memberikan jaminan kelangsungan hidup serta meningkatkan dan menjaga kualitas hidup masyarakat. Kualitas ini berwujud kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Infrastruktur memungkinkan energi dan air tersedia di setiap rumah, terakomodasinya aktivitas sosial, olahraga, dan rekreasi, meningkatnya aksesibilitas untuk menjalankan aktivitas harian (bekerja, bersekolah, dan berbelanja), serta meminimasi produksi dan pengaruh limbah padat/cair.

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan ini harus didukung strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat perkotaan. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase sampai dengan jalan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah yang ada di sekitar permukiman, merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini data kondisi infrastruktur permukiman selama tahun 2009-2013

Tabel 2. 4 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2013

Jenis Infrastruktur	Hasil kinerja sampai dengan tahun 2013				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>GEDUNG KANTOR</b>	9	37	7	8	9
<b>MCK</b>	12	3	4	4	4
<b>Air bersih Non PDAM</b>	24	21	21	24	25

Sumber: Dinas Cipta karya dan Tata Ruang Kab. Sidrap Tahun 2014

Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi air bersih dan sanitasi di Kab. Sidenreng Rappang masih jauh dari kondisi yang layak, diantaranya:

- Persentase jumlah masyarakat yang terakses ke cakupan layanan air bersih sudah mencapai 90%, tetapi dari segi kualitas masih sangat jauh dari kondisi yang layak.
- Persentase cakupan layanan persampahan baru 14%, sementara target yang harus dicapai sekitar 70% pada tahun 2018

- Sistem pengelolaan air limbah kita masih sistem on site. Jumlah masyarakat yang menggunakan tangki septik sudah 70%, tetapi baru 35% yang aman. Sementara masih ada yang menggunakan cubluk, serta BABS sebesar 23%. Target nasional tahun 2019 BABS 0%
- Jumlah luasan genangan yang ada di Kab. Sidrap masih sekitar 1455 Ha, dan adanya perubahan iklim menambah jumlah luasan genangan dan banjir.

Tabel 2. 5 Jumlah Yang Terlayani Infrastruktur Permukiman

Jenis Infrastruktur	Hasil kinerja sampai dengan tahun 2013
Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	77%
Prasarana Air Limbah	2.670 Jiwa
Air Bersih PDAM	6.107.484 Jiwa
Air Bersih NON PDAM	24.695 Jiwa
Persampahan	14%

Sumber: Dinas Cipta karya dan Tata Ruang Kab. Sidrap Tahun 2014

Mengingat di Kab. Sidenreng Rappang masih ada kawasan kumuh, maka perlu diantisipasi dengan penyediaan rumah layak huni dan melakukan penataan lingkungan di kawasan tersebut.. Di kab. Sidenreng Rappang jumlah luasan kawasan kumuh dari tahun 2009-2013 sudah mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan. Data luasan kawasan kumuh dapat dilihat pada table berikut. Pembangunan perumahan di beberapa lokasi perumahan yang ada di kab. Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2013 terdapat 10 (sepuluh) lokasi yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan maritengngae 6 lokasi, kec. Wt. pulu 3 lokasi dan 1 lokasi di Kecamatan Baranti. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan yang ada di kab. Sidenreng Rappang sudah berkembang pesat. Perumahan tersebut telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas social,

namun dalam hal sanitasi masih menggunakan sistem on site, belum menggunakan IPAL komunal.

Untuk melakukan keterpaduan dan pengendalian perencanaan program, maka pada tahun 2013 telah dilakukan penyusunan dokumen RPIJM Kab. Sidenreng Rappang tahun 2014-2018. Dokumen ini sangat penting untuk menjaga sinergitas dan keterpaduan antar program, serta untuk memantau sejauh mana perkembangan program-program keciptakaryaan. Selain itu Sebagaimana program dari direktorat jenderal Cipta karya adanya percepatan pembangunan sanitasi permukiman, maka Kab. Sidenreng Rappang telah mengikuti program tersebut dan telah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi dan dokumen Strategi sanitasi Kota dan pada Tahun 2014 dilakukan penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi.

Dokumen perencanaan permukiman yang ada di kab. Sidenreng Rappang tahun 2009-2013

No.	Jenis dokumen	Tahun Penyusunan
1.	SPPIP	2011
2.	RPKPP	2012
3.	Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL	2012
4.	Buku Putih Sanitasi	2013
5.	Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2014-2018	2013
6.	Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Tahun 2014-2018	2013
7.	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM)	2013
8.	Master Plan Drainase	2013
9.	Memorandum Program Sanitasi	2014

Sumber: Dinas Cipta karya dan Tata Ruang Kab. Sidrap Tahun 2014



Adapun program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tersebut antara lain :

Tabel 2. 6 Capaian Target Sasaran Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidrap Tahun 2011-2013

No.	Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Tersusunnya perencanaan infrastruktur permukiman di daerah-daerah yang sulit dan rawan bencana di 11 kecamatan			11 Kec.			11 kec	11 kec	11 kec.			11 kec	11 kec	11 kec.					
2	Tertatanya ruang terbuka hijau dan pengendalian pemanfaatan ruang di 2 kecamatan			2 Kec			2 kec	2 kec	2kec.			2 kec	2 kec	2kec.					
3	Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur keciptakaryaan			1 keg.			1 keg	1 keg	1 keg			1 keg	1 keg	1 keg					
4	Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di 5 kelurahan			5 kel.			5 kel.	-	-			5 kel.	-	-					
5	Terlayannya masyarakat dalam penyediaan dan penge			8 lokasi			-	4lokasi	4lokasi			-	4lokasi	4lokasi					

*Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018*

No.	Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	lolaan air limbah																		
6	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengusulan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pemb. Parasarana dan sarana dasar permukiman			100 %			100%	100%	100%			100%	100%	100%					
7	Tertatanya lingkungan permukiman perdesaan di desa-desa yang ada di kab. Sidrap			11 kec			11 kec	11 kec	11 kec.			11 kec	11 kec	11 kec.					
8	Berkurangnya jumlah genangan di kab. sidrap			50 %			50 %	50 %	50 %			50 %	50 %	50 %					
9	Bertambahnya kawasan ruang terbuka hijau sebesar 10 % dari luas areal kawasan			11 kec			11 kec	11 kec	11 kec.			11 kec	11 kec	11 kec.					
10	Terlayannya penanggulangan bencana kebakaran			11 kec			11 kec	11 kec	11 kec.			11 kec	11 kec	11 kec.					

No.	Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	secara cepat dan terkendali								kec.					kec.					
11	Terlayannya izin mendirikan bangunan baik pada rumah penduduk, perumahan maupun industri dan bangunan lainnya			11 kec			11 kec	11 kec	11 kec.			11 kec	11 kec	11 kec.					
12	Terlayannya masyarakat dalam operasi pelayanan kebersihan (persampahan dan pertamanan)			70 %			60 %	65 %	70 %			60 %	64,5 %	71,3%					
13	Terlayannya masyarakat dalam operasi pelayanan penerangan lampu jalan			11 kec			11 kec	11 kec	11 kec.			11 kec	11 kec	11 kec.					
14	Terlayannya administrasi perkantoran			100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %					
15	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %					
16	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan			100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %					

No.	Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	keuangan																		

Pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidrap Tahun 2011-2013

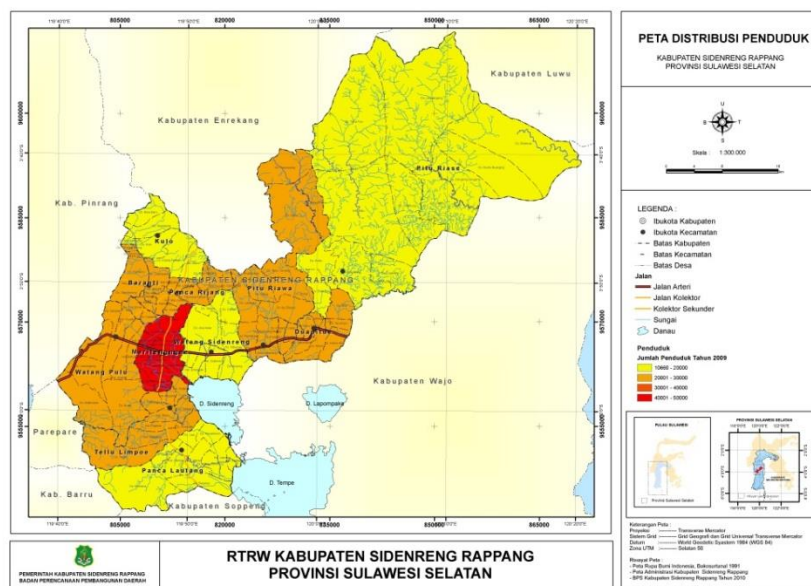
Rupiah dalam ribuan

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja CKTR</b>	-	72.026.991	82.405.929	53.599.029	48.912.646	-	56.409.224	46.835.796	29.166.763	40.614.320	-	78	57	54	83		
<b>Belanja Tidak langsung</b>	-	4.460.200	3.015.167	2.536.008	2.772.679	-	3.155.592	1.1780.451	2.240.134	2.661.719	-	71	59	88	96		
Belanja Pegawai	-	4.460.200	3.015.167	2.536.008	2.772.679	-	3.155.592	1.1780.451	2.240.134	2.661.719	-	71	59	88	96		
<b>Belanja Langsung</b>	-	<b>67.566.791</b>	<b>79.390.762</b>	<b>51.063.021</b>	<b>46.139.967</b>	-	<b>53.253.633</b>	<b>45.055.344</b>	<b>26.926.629</b>	<b>37.952.601</b>	-	<b>79</b>	<b>57</b>	<b>53</b>	<b>82</b>		
Belanja Pegawai	-	596.565.	227.325	255.955	380.527	-	558.238	161.286	155.176	325.319	-	94	71	61	85		
Belanja Barang dan Jasa	-	5.787.369	6.594.629	7.802.590	10.000.736	-	5.349.274	5.547.209	6.874.172	9.220.917	-	92	84	88	92		
Belanja Modal	-	61.182.857	72.568.808	43.004.476	35.758.704	-	47.409.224	39.346.849	19.897.281	28.406.366	-	77	54	54	79		

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu, dengan kerjasama program dan anggaran pembangunan ke-Cipta Karya-an di daerah antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kab/kota, mendorong pembangunan infrastruktur bidang ke-Cipta Karya-an di daerah dalam rangka memacu pertumbuhan kota/kabupaten dan pemerataan pembangunan.

Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dengan luas 1.883,25 Km<sup>2</sup> dengan jumlah 271.911 jiwa, sebaran penduduk dapat dilihat pada Gambar 3.1. Pemerintah daerah telah melakukan pembangunan infrastruktur seperti penataan lingkungan, pembangunan saluran drainase, penyediaan air bersih, pelayanan penerangan jalan umum, pelayanan persampahan, pembangunan gedung serta pemeliharaan ruang terbuka hijau.



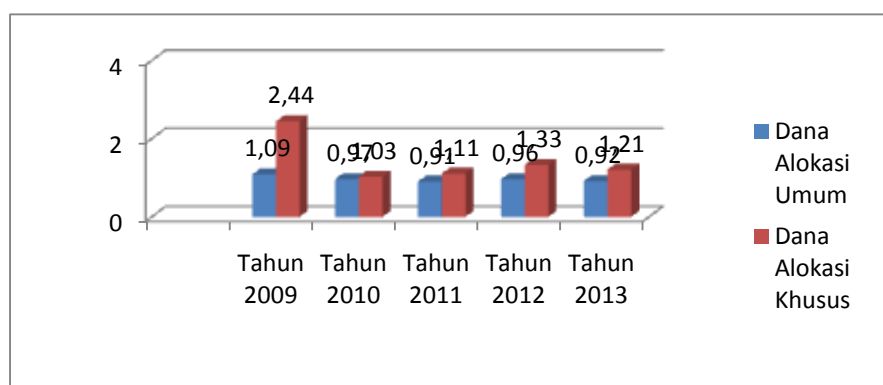
Gambar 3. 1 Peta Distribusi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam RPJMD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi beban sebesar 50% di kota Pangkajene dan Rappang. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai

*Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018*

SKPD yang memiliki tupoksi dalam pembangunan infrastruktur permukiman dalam program kerjanya Tahun 2010 telah dilaksanakan perbaikan Jalan Lingkungan di 7 (tujuh) kecamatan pada 26 (dua puluh enam) ruas berupa Penimbunan Badan Jalan Lingkungan permukiman, pembuatan jalan beton sampai pemasangan paving blok. Perbaikan saluran drainase telah dilaksanakan di 11 (sebelas) kecamatan pada 83 (delapan puluh tiga) wilayah desa/kelurahan.

Untuk mengantisipasi beberapa wilayah yang masih rawan ketersediaan air bersih telah dilakukan pembangunan dengan menyediakan sumber air bersih (Sumur dangkal dan Sumur Dalam), yang dilengkapi prasarana dan sambungan rumah di Desa Lainungan, Tana Toro, PonrangaE, Botto dan lainnya. PDAM juga terus meningkatkan pelayanannya dengan meningkatkan kapasitas air bersih dari Tahun 2009 hingga Tahun 2010 sebesar 1.117.071 m<sup>3</sup> meningkat 1.614.351 m<sup>3</sup>. Selama ini pembiayaan infrastruktur air bersih lebih banyak menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibanding Dana Alokasi Umum (DAU). Pada Tahun 2009 penggunaan DAK sebesar Rp. 2.444.999.000, sementara DAU hanya 1.087.800,19. Kemudian pada Tahun 2010 pembiayaan infrastruktur air bersih menurun menjadi Rp. 1.128.300, 00 untuk DAK sedang DAU sebesar Rp. 965.330.000. Penurunan anggaran ini tidak serta merta mengurangi pembangunan infrastruktur air bersih, hal ini terlihat dengan adanya program seperti PAMSIMAS dan beberapa program sanitasi lainnya. Pembagian Pembiayaan infrastruktur air bersih dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut:



Gambar 3.2 Perbandingan Pembiayaan Infrastruktur Air Bersih Antara DAU & DAK



Program PAMSIMAS sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur air bersih yang melibatkan masyarakat juga telah ada sejak Tahun 2008. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang direncanakan untuk 45 desa/kelurahan sampai Tahun 2012. Program ini telah dilaksanakan di 6 Desa/Kelurahan pada tahun 2008; 14 desa/kelurahan pada tahun 2009; dan pada Tahun 2010 di 12 Desa/Kelurahan. Target jumlah desa yang ingin dicapai hingga Tahun 2012 sebanyak 46 desa. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan sistem pembiayaan secara sharing yaitu dari Masyarakat sebesar 20% (*In Kind* 16 % dan *In Cash* 4%), Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 10 % dan Pemerintah Pusat 70%.

Kepedulian terhadap dunia pendidikan juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini terbukti dengan dibangunnya Asrama Mahasiswa untuk 7 (tujuh) Kecamatan di kota Makassar dilengkapi dengan Gedung Sidrap Centre yang pembangunannya dilakukan secara bertahap sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2010. Lokasi ke tujuh Asrama Mahasiswa itu dapat dilihat pada Tabel 3.1. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sosial seperti Masjid dan Gedung Masyarakat yang tersebar di Kabupaten Sidrap.

Tabel 3.1 Data Gedung Asrama Mahasiswa Sidrap di Kota Makassar

No.	Uraian	Lokasi	Tahun Pembangunan
1.	Asrama Mahasiswa Panca Lautang	Jl. Dt. Patimang	
2.	Asrama Mahasiswa Pitu Riase	Antang	
3.	Asrama Mahasiswa Maritengngae dan Pitu Riawa	Tello	2006
4.	Asrama Mahasiswa Kulo	Tamalanrea	2006
5.	Asrama Mahasiswa Dua Pitue dan Baranti	BTP Tamalanrea	2008

Pembangunan Kantor SKPD yang tergabung di Kompleks SKPD Pemda Kab. Sidrap di Batu Lappa juga telah dilakukan pada Tahun 2010 sebanyak unit. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan direncanakan selesai pada Tahun 2011 dengan menggunakan Dana APBN, DAU dan DAK. Ada 3 jenis

bangunan yaitu gedung untuk SKPD kecil sebanyak 23 unit, SKPD Menengah 1 unit dan SKPD besar sebanyak 3 unit. Hal ini disesuaikan dengan tupoksi SKPD dan cakupan layanan SKPD. Pemusatan kantor SKPD ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi lintas SKPD. Diharapkan dengan adanya pemusatan ini dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan roda pemerintahan.

Seiring meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan penduduk terhadap rumah yang layak huni yang dilengkapi dengan pengelolaan sistem sanitasi yang sehat semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan pemerintah pusat telah membangun 15 (lima belas) unit MCK Lomenal yang mampu melayani 50 jiwa/unit pada Tahun 2008 yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan. Kemudian pada Tahun 2010 dibangun lagi 2 (dua) MCK++ (MCK yang disertai pengelolaan limbah menjadi biogas) di Kecamatan MaritengngaE dan Kecamatan Baranti dengan cakupan pelayanan 200 jiwa/unit.

Selain pengelolaan Sanitasi, penanggulangan limbah sampah juga menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyiapkan lahan TPA seluas 2 Ha sejak Tahun 2005 dengan sistem *Open Dumping*. Pada Tahun 2010 Pengelolaan Sampah telah mengalami peningkatan, dimana tersedia 9 (sembilan) armada dengan 5 (lima) kontainer dan 70 (tujuh puluh) lokasi TPS. Namun hal ini masih jauh dari harapan sebab cakupan pelayanan baru  $\pm 27\%$  dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. Kondisi ini masih harus diperbaiki dengan memperluas cakupan pelayanan, serta sistem pengelolaannya tidak lagi menggunakan *open dumping*, tetapi dengan sistem *sanitary landfill*.

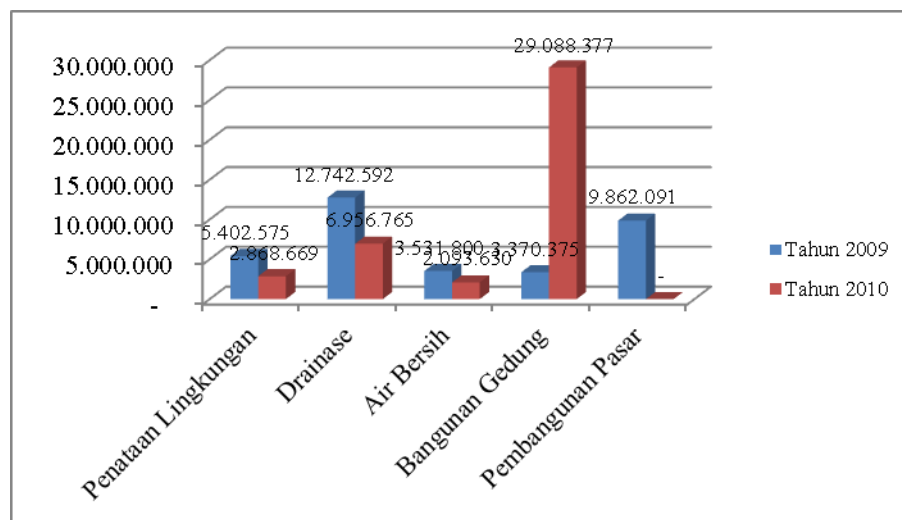
Selanjutnya untuk infrastruktur penerangan lampu jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang telah tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dengan  $\pm 3800$  titik lampu jalan hingga Tahun 2010. Dalam pelaksanaan kegiatannya melakukan pemeliharaan di beberapa titik berdasarkan monitoring di lapangan dan aduan masyarakat.

Unit Pemadam Kebakaran telah dilengkapi dengan 4 unit kendaraan operasional dengan 26 personil, dengan cakupan layanan di 11 (sebelas) kecamatan dengan target pencapaian ke lokasi kejadian di lokasi yang dekat  $\pm 5$  menit, semntara untuk daerah yang jauh seperti kecamatan Duapitue  $\pm 20$  menit.Selain itu cakupan layanan juga hingga ke Kabupaten terdekat.

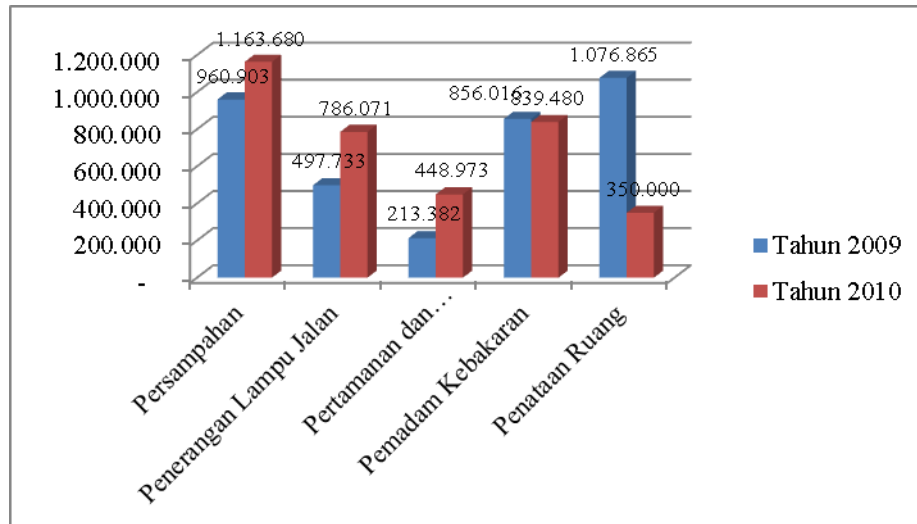
Untuk penataan ruang telah dilakukan pemeliharaan di ruang terbuka hijau yang juga berfungsi sebagai kawasan heritage, diantaranya lapangan Pramuka Lagading pada Tahun 2009 ; Kawasan sekitar Stadion Ganggawa Pangkajene pada Tahun 2008, 2009, dan 2010.

Dalam hal pemanfaatan ruang, pemberian Izin Mendirikan Bangunan mengacu pada regulasi pemerintah. Dalam hal penetapan Garis Sempadan Bangunan, telah diatur dalam Perda Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan N0. 3 Tahun 2005.Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) pada Tahun 2010 dari Retribusi IMB adalah sbesar Rp. 584.393.475.

Dalam hal pembiayaan infrastruktur di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki angka yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan infrastruktur tersebut. Perbandingan pembiayaan infrastruktur keciptakaryaannya berdasarkan jenis infrastruktur Tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut ini :



Gambar 3.3 Perbandingan Biaya Infrastruktur Bidang Permukiman Tahun 2009 dan 2010



Gambar 3. 4 Perbandingan Biaya Infrastruktur Bidang Kebersihan dan Keindahan dan Penataan Ruang Tahun 2009 dan 2010

Pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 terlihat pembiayaan Pembangunan Gedung yang terbesar pada Tahun 2010, menyusul pembangunan Drainase, Penataan Lingkungan dan Air Bersih. Tingginya biaya pembangunan Drainase, penataan lingkungan dan air bersih merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Meski demikian permasalahan infrastruktur belum selesai, masih banyak yang harus dibenahi.

Tantangan dalam pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan ruang adalah mensinergikan antara pembangunan infrastruktur permukiman dengan penataan ruang. Peran serta masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif akan lebih efisien dan efektif dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Adanya keterpaduan dalam pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan ruang dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan kendala suatu wilayah akan memberikan pelayanan yang optimal dan kemudahan dalam pemenuhan pelayanan ke-Cipta-Karya-an terhadap masyarakat.

## **BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Pembangunan yang kompetitif dalam pengembangan suatu wilayah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Akibat dari kondisi ini pada umumnya pembangunan dilakukan secara ekspansif dan tidak terencana, yang berpengaruh terhadap penataan ruang dan daya dukung daerah.

Permasalahan umum dalam pembangunan infrastruktur adalah peningkatan populasi penduduk yang meningkat pesat, adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah, kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah dan juga berbagai bencana alam. Di sisi lain akibat pembangunan yang terus menerus sering mengabaikan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Eksplorasi yang terus menerus akibat pembangunan memberi dampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan

Secara khusus permasalahan dalam pembangunan ke-Cipta-Karya-an yang menyangkut infrastruktur permukiman dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan infrastruktur dan layanan ke-Cipta-Karya-an yang belum merata ke semua golongan masyarakat.
- 2) Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya akibat pembangunan yang ekspansif dan alih fungsi ruang, dan belum berperannya secara maksimal pembangunan bidang ke-Cipta-Karya-an dalam turut menciptakan kota-kota berkelanjutan.
- 3) Wajah fisik perkotaan yang masih semrawut akibat belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata-bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan.
- 4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan infrastruktur.

- 5) Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi kebakaran.
- 6) Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan hijau/terbuka, sarana olah raga.
- 7) Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan.
- 8) Belum optimalnya penanganan air limbah.
- 9) Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- 10) Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase.
- 11) Makin tingginya timbulan sampah (jumlah penduduk makin tinggi, jumlah sampah per kapita meningkat).
- 12) Belum optimalnya manajemen persampahan.
- 13) Belum optimalnya sistem perencanaan (rencana sampai dengan monitoring dan evaluasi). - belum memadainya pengelolaan layanan persampahan (kapasitas, pendanaan dan aset manajemen).
- 14) Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggara air minum di daerah.
- 15) Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan.
- 16) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan air minum.
- 17) Belum optimalnya perencanaan pengembangan sumber daya manusia serta kekeliruan dalam penempatan dan penugasan tenaga-tenaga teknis.
- 18) Belum memadainya struktur organisasi yang responsif terhadap tantangan pembangunan bidang Cipta Karya.
- 19) Belum tersusunnya tata laksana organisasi yang sesuai dengan prinsip *good governance* untuk meningkatkan daya saing.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018**

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan salah satu Instansi Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Visi Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 yaitu ;

#### **TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT.**

Dari visi tersebut mengandung makna:

**MAJU** ; Mengandung makna adanya perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Momentum pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional akan menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Didukung oleh peningkatan kualitas infra struktur yang menciptakan kelancaran aksesibilitas antar wilayah, disertai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik pula secara simultan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

**TERKEMUKA;** Mengandung makna adanya kemajuan dalam sektor yang menjadi Unggulan sehingga menjadi contoh bagi daerah lain, bahkan mampu mempengaruhi kondisi sektor yang sama di daerah lain. Apakah karena dari sisi produksi Kabupaten Sidenreng Rappang mampu mensuplay daerah lain, atau dari sisi Penerapan Teknologi lebih maju sehingga mampu menginspirasi masyarakat di daerah lain dalam mengembangkan sektor yang sama. Beberapa sektor yang sudah sangat maju dan membuat Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal misalnya Produksi Padi dan Telur ayam. Dan beberapa yang berpotensi untuk berkembang cepat seperti Sapi dan beberapa produk perkebunan, serta Pemanfaatan energi

baru terbarukan melalui Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga sekam dan Pembangkit listrik tenaga angin.

**RELIGIUS;** Mengandung makna kondisi masyarakat yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

**PENDAPATAN DUA KALI LIPAT;** Mengandung makna bahwa dalam jangka waktu 5 tahun, periode 2013 – 2018, Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang akan meningkat dua kali lipat.

Dari Visi tersebut diatas maka dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan;** sekaligus dianalogikan sebagai mewakili komponen Lantai bangunan.

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian ditempatkan sebagai misi pertama, karena rata-rata 48 persen Perekonomian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari sektor pertanian. Khususnya pertanian tanaman pangan. Dan sudah mulai pula berkembang sektor usaha tani yang lain secara terintegrasi seperti Jagung, Ayam Petelur, Sapi, dan beberapa komoditi perkebunan. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan teknologi, tersedianya infrastruktur, sumber energi, dan dukungan permodalan mendorong tumbuhnya industry Pengolahan dan dan kegiatan produktif lainnya yang mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian.

2. **Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.** Sekaligus dianalogikan mewakili komponen dinding bagian depan dari bangunan



Kegiatan usaha tani yang memproduksi bahan mentah biasanya mempunyai resiko dan biaya yang cukup tinggi sehingga nilai tambahnya masih relative rendah. Oleh karena itu perlu didorong agar petani dan masyarakat melakukan kegiatan “PETIK”, “OLAH”, DAN “JUAL”. Oleh karena itu dengan mendorong tumbuhnya UMKM, disertai pelatihan dan dukungan permodalan, dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan percepatan gerak roda perekonomian masyarakat

- 3. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.** Dianalogikan mewakili komponen dinding sisi kanan bangunan.

Tersedianya sumberdaya alam yang melimpah tidak akan dapat secara langsung memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan rakyat jika tidak tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara efektif dan efisien. Dan hanya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang bisa mengelola sumberdaya alam yang ada itu secara efektif dan efisien. Ini akan didukung oleh keberadaan perguruan tinggi negeri berbasis ilmu pertanian dan lembaga lain baik swasta maupun negeri akan sangat membantu melahirkan sumber daya manusia yang terampil.

- 4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.** Selanjutnya dianalogikan sebagai komponen dinding sisi kiri bangunan.

Searah dengan rencana visi jangka panjang, untuk menciptakan wilayah yang mandiri, diperlukan tersedianya infra struktur jalan, jembatan, dan telekomunikasi yang memadai sehingga memudahkan arus pergerakan orang, barang dan informasi ke semua wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Infra Struktur yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya

akan melahirkan efisiensi. Efisiensi menciptakan daya saing, dan daya saing menciptakan kualitas

5. **Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif,** digambarkan mewakili komponen dinding bagian belakang bangunan

Salah satu pra syarat dapat melaksanakan program program pembangunan adalah “Keamanan dan Ketertiban yang terkendali”. Aktivitas ekonomi akan terganggu jika keamanan dan ketertiban juga terganggu. Keresahan akan muncul di mana mana jika terjadi konflik. Oleh karena itu menjadi penting untuk menciptakan dan menjaga kondisi kehidupan sosial yang kondusif

6. **Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.** Dalam konteks analogi membangun rumah impian, digambarkan mewakili komponen atap bangunan yang kokoh.

Masyarakat dengan segala dinamikanya memiliki berbagai macam potensi konflik dan pertentangan kepentingan. Oleh karena itu diperlukan kehadiran pemerintah yang mampu melayani, memfasilitasi, dan melindungi kepentingan masyarakat. Diperlukan hadirnya pemerintahan yang melindungi golongan yang tidak berdaya, peka terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Pro gender, dan mampu mengelola sumber daya pembangunan secara berkelanjutan

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi**

### **3.4 Telaahan RTRW 2012-2032**

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

#### **Rencana Struktur Ruang**

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti,

Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	PKL	PKLp	PPK	PPL
1	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4				PPL Kecamatan Panca Lautang

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap

Untuk sistem Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan perkeretaapian. Untuk sistem jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan ke pusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota ke arah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan

lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

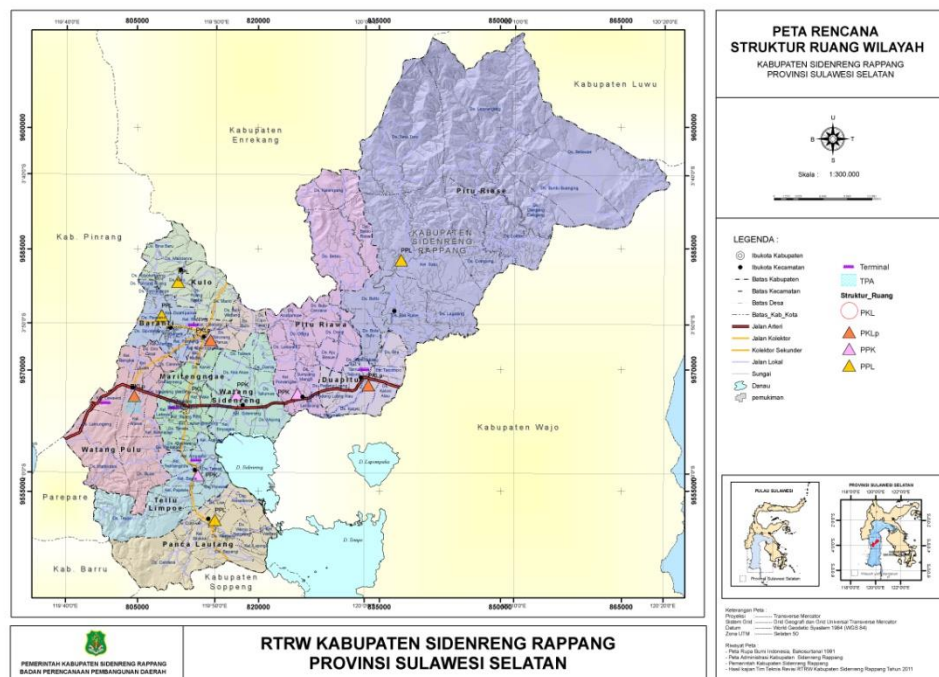
Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api masih berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api masih memberikan kontribusi sangat rendah dibandingkan dengan pelayanan dari moda angkutan umum lain terutama darat. Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu rencana jalur kereta api lintas Sulawesi Barat - Makassar – Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih di prioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah

Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk jaringan sumber daya air rencana pengembangan kedepannya lebih diprioritaskan pada pembangunan jaringan irigasi, embung-embung, dan bendung dalam hal ini bendung Boya dan Torere untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### Struktur Ruang saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, di mana pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.



Gambar 3. 5 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap dan Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternative yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

### **Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku salah satu instansi teknis yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pembangunan daerah pada tingkat kabupaten harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya termasuk Rencana Tata Ruang ilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan yang akan disusun oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait dengan penataan ruang yang sejalan dengan RTRW serta RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun antara lain :

- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Selain rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait penataan ruang, Bappeda dan beberapa SKPD teknis juga akan melaksanakan kegiatan untuk mendukung terwujudnya rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap untuk lima tahun yang akan datang serta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan komponen utama infrastruktur meliputi transportasi, sumberdaya air, air minum, sanitasi, drainase, limbah dan permukiman. Komponen utama infrastruktur ini sangat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai memberi jaminan kemudahan dalam pergerakan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan ini harus didukung strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat perkotaan. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase sampai dengan jalan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah yang ada di sekitar permukiman, merupakan suatu sistem infrastruktur



terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Beberapa regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2000 Tentang Bangunan Gedung, yang mengamanatkan pembangunan gedung harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Regulasi lainnya adalah UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang mewajibkan agar dalam pengelolaan sumber daya air maupun jalan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Selain itu dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menegaskan dalam penataan ruang dan pemanfaatannya menjaga keseimbangan lingkungan.

. Untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, maka perlu dilakukan upaya melalui (a) pengembangan regulasi dan kebijakan; (b) pemberdayaan dan kemitraan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; (c) peningkatan kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman; (d) pengembangan pengelolaan aset (property management); (e) serta fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan permukiman daerah.

## **BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 Visi dan Misi**

Berdasarkan Perda Bupati No. 01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang menyebutkan bahwa Pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan serta penataan ruang permukiman sebagai tugas pokok utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yaitu **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat.”**, maka dirumuskan Visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah **“Terwujudnya Penataan Ruang Permukiman dan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan”**. Makna dari Visi tersebut adalah:

- **Handal**, yaitu: penataan ruang permukiman dan infrastruktur yang dapat difungsikan dengan layak dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk pembangunan ekonomi.
- **Berkelanjutan**, yaitu: penataan ruang permukiman dan infrastruktur yang dapat dipakai untuk jangka panjang dan layak serta memperhatikan kualitas lingkungan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014-2018 adalah:

1. Menyediakan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan lingkungan permukiman sehat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. Menciptakan penataan ruang permukiman yang teratur dan layak;
4. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penertiban dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip *good governance*.

## 4.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran atas Visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidrap, maka tujuan yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2014-2018 meliputi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian penataan ruang permukiman dan pembangunan infrastruktur demi perwujudan pembangunan yang handal dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Persampahan, Penerangan Lampu jalan, dan Pemadam Kebakaran.

Dari 3 (tiga) tujuan utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas, maka sasarannya adalah :

*Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian penataan ruang permukiman dan pembangunan infrastruktur demi perwujudan pembangunan yang handal dan berkelanjutan. Sasarannya adalah:*

1. Penyusunan Perencanaan pembangunan Infrastruktur permukiman di daerah-daerah yang sulit dengan mempertimbangkan skala prioritas.  
Indikator kinerja outcome:  
Tersusunnya perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di daerah-daerah yang sulit dan rawan bencana di 11 (sebelas) kecamatan.
2. Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.  
Indikator kinerja outcome:  
Tertatanya ruang terbuka hijau dan pengendalian pemanfaatan ruang di 2 (dua) kecamatan.
3. Pendataan sarana dan prasarana infrastruktur keciptakaryaan.  
Indikator Kinerja Outcome:  
Tersedianya data sarana dan prasarana infrastruktur keciptakaryaan.

*Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.*

Sasarannya adalah:

1. Penataan kawasan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.  
Indikator Kinerja Outcome:  
Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
2. Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat.  
Indikator Kinerja outcome:  
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengusulan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman.
3. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun desa.  
Indikator kinerja outcome  
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur pedesaan melalui program-program pemberdayaan di bidang infrastruktur.
4. Penyediaan dan pengelolaan air baku.  
Indikator kinerja outcome:  
Terlayannya masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan air baku.
5. Penyediaan dan pengelolaan air limbah.  
Indikator kinerja Outcome  
Terlayannya masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan air limbah.
6. Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan.  
Indikator kinerja Outcome:  
Tertatanya lingkungan permukiman perdesaan di desa-desa yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.  
Indikator kinerja Outcome:  
Berkurangnya jumlah genangan di Kabupaten Sidrap.
8. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

Indikator kinerja Outcome:

Bertambahnya kawasan ruang terbuka hijau sebesar 10% dari luas areal kawasan.

*Meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Persampahan, Penerangan Lampu jalan dan Pemadam Kebakaran. Sasarannya adalah:*

1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

Indikator kinerja outcome:

Terlayannya penanggulangan bencana kebakaran secara cepat dan terkendali.

2. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang khususnya dalam pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Indikator kinerja outcome:

Terlayannya Izin Mendirikan Bangunan baik pada rumah penduduk, perumahan maupun industri dan bangunan lainnya.

3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana persampahan.

Indikator kinerja outcome:

Terlayannya masyarakat dalam operasi pelayanan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Peningkatan Penerangan Lampu Jalan.

Indikator kinerja outcome:

Terlayannya masyarakat dalam operasi pelayanan penerangan lampu jalan.

### **4.3 Strategi dan Kebijakan**

Kebijakan dan strategi keciptakaryaan terdiri dari pengembangan infrastruktur permukiman dan penataan ruang yang handal dan berkelanjutan.

Strategi:

- Prasarana dan sarana serta pelayanan dasar yang memadai dan berkeadilan.
- Peningkatan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah.
- Peningkatan pola dan mekanisme pelibatan stakeholders dalam pembangunan perkotaan
- Pendataan infrastruktur permukiman dan penataan ruang



Kebijakan strategi permukiman terdiri dari pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera dan berkeadilan sosial. Strategi:

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara
- Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan.
- Penataan lingkungan yang terencana dan terpadu
- Membuat peraturan daerah tentang pembangunan gedung



Kebijakan dan strategi pengembangan air minum adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum. Strategi:

- Mengembangkan aset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.
- Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui non perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi.
- Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu.
- Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.





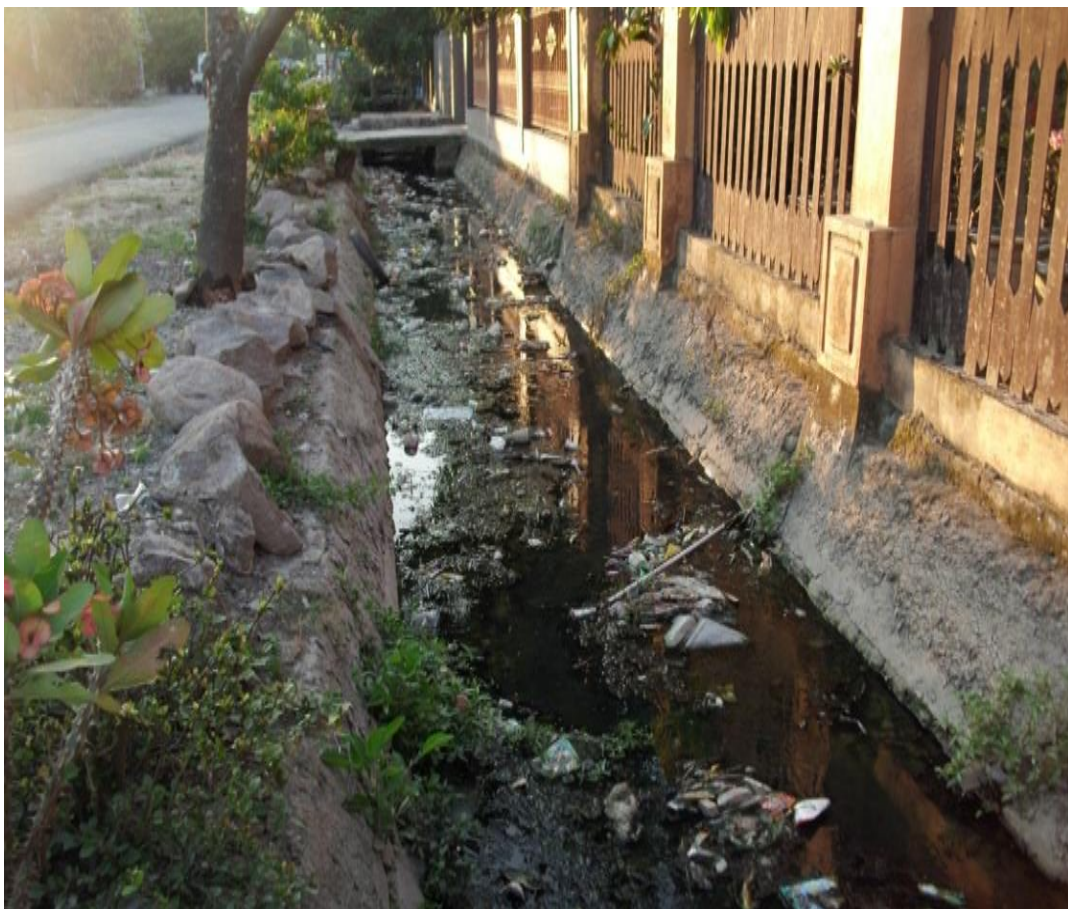
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan persampahan adalah peningkatan cakupan layanan dan kualitas sistem pengelolaan dan pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan. Strategi:

- Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten kota
- Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan
- Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola
- Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan.
- Membuat peraturan daerah tentang persampahan
- Melaksanakan Rehabilitasi TPA



Kebijakan dan strategi pengembangan sistem limbah permukiman adalah peningkatan cakupan layanan dan kualitas sistem pengelolaan limbah permukiman. Strategi:

- Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat.
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.



Kebijakan dan strategi penanggulangan bahaya kebakaran adalah peningkatan pelayanan dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Strategi:

- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran.
- Meningkatkan kualitas SDM unit pemadam kebakaran.
- Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana unit pemadam kebakaran sesuai kebutuhan.



Kebijakan dan strategi penataan ruang terbuka hijau adalah peningkatan luas areal ruang terbuka hijau dan pemeliharaan serta peningkatan fungsi dari ruang terbuka hijau. Strategi:

- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan ruang terbuka hijau.
- Meningkatkan kualitas SDM bidang penataan ruang.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberian izin pemanfaatan ruang
- Pemeliharaan taman hutan kota dan kawasan-kawasan heritage.



# BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN

## 5.1 Program dan Kegiatan

Rincian program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2014-2018 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.2, sedangkan nama program yang akan mewadahnya adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Perencanaan Tata Ruang
8. Program Pemanfaatan Tata Ruang
9. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
10. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
11. Program Penerangan Lampu Jalan
12. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
14. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
15. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
16. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah
18. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
19. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
20. Program Perencanaan Pengawasan, Pengujian dan Pengendalian Mutu
21. Program Pengembangan Perumahan
22. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
23. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

## **5.2 Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari bidang-bidang yang ada lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang:

1. Jumlah Kebijakan, Dokumen, Program/Kegiatan dan Anggaran, Data/Informasi serta evaluasi kinerja Infrastruktur Permukiman dan Penataan Ruang sesuai aturan yang berlaku;
2. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman, terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya, mendapat pasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, dan tertangani sistem persampahannya serta tertanggulangi bencana kebakaran;
3. Jumlah penyelenggara air minum yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan dan pemeliharannya.
4. Jumlah kawasan hijau, rumah, industri dan bangunan gedung lainnya yang ber-IMB dan tertata, serta tertangani penerangan lampu jalannya;
5. Persentase terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan, sosial dan umum yang representatif;
6. Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi layak, handal dan berkelanjutan;

## **5.3 Pendanaan Indikatif**

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang dilakukan melalui target-target berupa program dan kegiatan baik yang bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan pertumbuhan struktur ekonomi, politik, global. Maka disusun skenario kebutuhan pendanaan, sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yakni Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan dan Keindahan serta 1 (satu) Unit yaitu UPTD Pemadam Kebakaran.

Untuk Sekretariat alokasi dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 8.127.222.000,- , alokasi tersebut terbagi dalam lima program yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 4.912.032.000;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 2.187.805.000;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 120.000.000;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 337.200.000;
5. Pengembangan Data/Informasi sebesar Rp. 570.185.000;

Bidang Permukiman alokasi dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 205.787.164.000,- , alokasi tersebut terbagi dalam sepuluh program yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur perdesaan sebesar Rp. 27.393.100.000;
2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp.55.800.000.000;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 76.100.000.000;
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa sebesar Rp. 2.977.600.000;
5. Perencanaan, Pengawasan, Pengujian, dan Pengendalian Mutu sebesar Rp.2.579.564.000;
6. Penyediaan dan Pengelolaan Air baku sebesar Rp. 16.840.000.000;
7. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah sebesar Rp. 12.578.900.000;
8. Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya sebesar Rp. 3.175.000.000;
9. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar sebesar Rp. 14.283.000.000;
10. Pengembangan Perumahan sebesar Rp. 11.300.000.000.

Bidang Tata Ruang, alokasi dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 19.642.635.000, alokasi tersebut terbagi dalam empat program yaitu:

1. Perencanaan Tata Ruang sebesar Rp. 5.139.407.000;
2. Pemanfaatan Ruang sebesar Rp. 12.999.234.000;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar Rp. 1.336.994.000;
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp. 167.000.000 .

Bidang Kebersihan dan Keindahan, alokasi dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 77.584.201.000, alokasi tersebut terbagi dalam lima program yaitu:

1. Pemberdayaan Komunitas Perumahan sebesar Rp. 5.950.000.000;
2. Penerangan Lampu Jalan sebesar Rp. 28.394.000.000;
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp. 9.555.000.000;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 33.685.201.000;
5. Pengelolaan Areal Pemakaman sebesar Rp. 920.000.000.

UPTD Pemadam Kebakaran, alokasi dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 12.000.000.000.

Tingginya anggaran di Bidang Permukiman dimungkinkan karena di bidang tersebut mengelola 10 (sepuluh) program yang terbagi menjadi 12 (dua belas) kegiatan. Kegiatan ini merupakan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi sasaran pencapaian RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018. Kemudian penganggaran pada Bidang Kebersihan dan Keindahan juga cukup besar sebab pada bidang ini mengelola operasional kebersihan, pertamanan dan Lampu jalan yang secara rutin dikeluarkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun perincian alokasi tahunan dari masing-masing bidang dari Tahun 2014 hingga Tahun 2018 terlihat dalam Tabel 5.1 berikut:



Tabel 5. 1 Rincian Alokasi Dana Per tahun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	Bidang	Total	Rincian Alokasi Anggaran Per Tahun (dalam ribuan)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sekretariat	8.127.222	1.495.252	1.688.636	1.686.400	1.696.400	1.705.400
2.	Permukiman	205.787.164	20.023.064	19.444.000	23.355.000	29.360.000	32.455.000
3.	Tata Ruang	19.642.635	2.187.728	3.910.000	6.725.000	3.875.000	4.825.000
4.	Kebersihan Keindahan	77.584.201	10.3399.000	13.444.000	16.918.000	18.990.000	18.290.000
5.	Pemadam Kebakaran	12.000.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000	2.800.000	3.200.000

Matriks program/kegiatan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Permukiman dan Penataan Ruang																					
I	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar kota dan antar wilayah		1.03.30	PEMB. INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan															
				1.03.30.01	- Peningkatan Lingk.Perumahan Penduduk Perdesaan	Terciptanya jalan lingkungan yang indah dan nyaman	14.300 m	1.240 m	1.050	3.300 m	3.090	3.300 m	3.940	3.300 m	5.490	2.500 m	13.282,7	12 ds/ kel. Kec. Mari teng ngaE	26.881,1	Permukiman	
				1.03.30.11	- Operasional Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terwujudnya infrastruktur perdesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	0	6 Desa / Kel	50	6 Desa / Kel	90,4	6 Desa / Kel	100	6 Desa / Kel	125	6 Desa / Kel	150	6 Desa / Kel	515.4	Permukiman	

Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah																					
2	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatkannya ketersediaan infrastruktur permukiman dan sanitasi air bersih yang berkualitas		1.03.19	PENINGKATAN KESIAWAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Meningkatnya penanganan kasus kebakaran															
				1.03.19.12	- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tertanggulangnya kejadian kebakaran	85 %	87 %	1.600	89 %	2.000	91 %	2.400	93 %	2.800	95 %	3.200	95%	12.000	UPTD Pemadam Kebakaran	Kab. Sidrap

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah																					
3	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman dan sanitasi air bersih yang berkualitas		1.03.16	PEMB. SAL. DRAINASE/GORONG-2	Drainase dlm kondisi baik/pembuangan air tdk tersumbat															
				1.03.16.03	- Pemb. Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah lokasi yang tidak mengalami banjir	8,62 %	9,5 %	5.000	10,2 %	4.000	10,9 %	7.500	11,68 %	17.300	12,27 %	22.000	12,27 %	55.800	Permukiman	
				1.03.26	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAN AIR BAKU	Terwujudnya pembangunan air bersih dan sehat															
				1.03.26.01	Pemb. Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Jumlah lokasi yang terlayani air baku dan tingkat partisipasi masyarakat	21 Desa / Kel.	9 Desa / Kel.	1.700	5 Desa / Kel.	1.700	5 Desa / Kel.	2.650	5 Desa / Kel.	5.390	3 Desa / Kel.	5.400	27 Desa / Kel.	16.840	Permukiman	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah																					
4	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatkannya ketersediaan infrastruktur permukiman dan sanitasi air bersih yang berkualitas		1.03.26	PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, & KONSERVASI SUNGAI, DANAU & SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Rumah tangga pengguna air bersih															
				1.03.26.05	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, danau, & Sumber Daya Air Lainnya	Terlayannya masyarakat dalam penyediaan dan pengolahan air baku	45 Ds/ kel.	6 ds/ kel.	725	10 ds/ kel.	700	3 ds/ kel.	500	3 ds/ kel.	600	3 ds/ kel.	600	25 ds/ kel.	3.175	Permukiman	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah																					
5	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatkannya ketersediaan infrastruktur permukaan dan sanitasi air bersih yang berkualitas		1.03.27	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Terwujudnya pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat															
				1.03.27.02	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah lokasi yang terlayani air limbah	12 Desa/ Kel atau 4,14 %	5 ds/ Kel	1.200	5 ds/ Kel	2.728,9	5 ds/ Kel	2.950	5 ds/ Kel	2.950	5 ds/ Kel	2.750	25 ds/ Kel	12.578,9	Permukiman	
				1.03.17	PENINGKATAN PARTISIPASI MASY. DLM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan															

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerlancar aksesibilitasantar wilayah</b>																					
6	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatkannya ketersediaan infrastruktur permukiman dan sanitasi air bersih yang berkualitas		1.03.17.05	- PNPM-Mandiri Perkotaan	Terciptanya lingkungan permukiman yang indah dan nyaman	12 Ds/ kel. Dalam kec.MaritengaE	12 ds/ kel. Kec. MaritengaE	457,6	12 ds/ kel. Kec. MaritengaE	550	12 ds/ kel. Kec. MaritengaE	600	12 ds/ kel. Kec. MaritengaE	670	12 ds/ kel. Kec. MaritengaE	700	12 ds/ kel. Kec. MaritengaE	2.977,6	Permukiman	
				1.03.19	PERENCANGAN KOTA-2 MENENGAH & BESAR	Terwujudnya pembangunan infrastruktur permukiman yang handal															
				1.03.19.15	- Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terwujudnya infrastruktur permukiman yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kondisi lingkungan masyarakat	Dok. BPS dan SSK	Dok. MPS	284,3	Up Dating MPS	730	Up Dating MPS	2.630	Up Dating MPS	5.640	Up Dating MPS	5.130	Up Dating MPS	14.283	Permukiman	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah																					
7	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatkannya ketersediaan infrastruktur permukaan dan sanitasi air bersih yang berkualitas		1.03.15	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya kesehatan masyarakat															
				1.03.15.04	- Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan	Jumlah lokasi yang terlayani pengolaan persampahan	40 %	3.034	50 %	4.544	60 %	5.339	65%	8.035	70%	12.230	70 %	33.685	Seksi Kebersihan		
				1.03.17	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Pemberdayaan komunitas perumahan															



Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitasantar wilayah</b>																					
8	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukaan dan sanitasi air bersih yang berkualitas		1.03.17.02	- Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	Terlaksananya pemeliharaan lampu jalan		3.904 titik	5.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi PJU		
				1.03.18	PENERANGAN LAMPU JALAN	Jumlah titik lampu Jalan yang terpelihara dan terbangun															
				1.03.18.02	- Penerangan Lampu Jalan	Terlaksananya pemeliharaan lampu jalan dan Pembangunan/ Pemasangan PJU LED		-	-	200 titik	7.600	200 titik	9.579	200 titik	8.715	100 titik	2.500	4.625 titik	28.394	Seksi PJU	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitasantar wilayah																					
9	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatkannya keterpuhan rumah layak huni bagi orang miskin		1.04.15	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni															
				1.04.15.09	- Pengembangan perumahan	Tersedianya data kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni		-	-	1 kec.	300	1 kec.	1.000	3 kec.	3.000	7 kec.	7.000	11 kec.	11.300	Permukiman	
	Mewujudkan penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan		1.03.15	PERENCANAAN TATA RUANG	Meningkatkan perencanaan Tata Ruang																
			1.03.15.02	- Penetapan Kebijakan, RDTRK, RTRK dan RTBL	Tersedianya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)	2 dok	-	-	1 dok	500	2 dok	1.500	2 dok	850	-	-	5 dok	2.850	Tata Ruang	2015: Empagea 2016: Lancirang & Bilokka 2017: Baranti & Kulo	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitasantar wilayah																					
10	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Mewujudkan penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan		1.03.15.11	- Revisi Rencana Tata Ruang	Tercapainya Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai Undang-Undang Baru	5 dok	3 dok	1.104,06	-	-	2 dok	800	-	-	-	-	5 dok	1.904,06	Tata Ruang	2014 : Pangkajene, Uluale & Rappang 2015 : Tanru Tedong & Amparita
				1.03.15.12	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan & Lingk.	Tersusunnya RTBL di Kab. Sidrap	2 dok	-	-	1 dok	160	2 dok	350	1 dok	200	1 dok	200	7 dok	910	Tata Ruang	
				1.03.15.13	- Survey dan Pemetaan	Tersedianya data IMB yang akurat	4 dok	4 dok	185,347	3 dok	200	-	-	-	-	-	-	7 dok	385,347	Tata Ruang	2014 : Kulo, Baranti, Wt. Pulu & Wt. Si denreng 2015 : Dua Pitue, Pitu Riawa & Pitu Riase

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				2018	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah																					
11	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Mewujudkan penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan		1.03.16	PEMANFAATAN RUANG	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang															
				1.03.16.04	- Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Pelayanan dan penetapan zona bangunan	11 kec.	11 kec	65,441	11 kec	50	11 kec	50	11 kec	50	11 kec	250	Tata Ruang			
				1.03.16.10	- Pemanfaatan Ruang	Tersedianya RTH yang layak dan sesuai fungsi penataan	1 lokasi	2 lokasi	512,793	3 lokasi	2.550	1 lokasi	3.750	1 lokasi	2.250	1 lokasi	3.950	8 lokasi	13.828	Tata Ruang	
				1.03.24	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Meningkatkan keindahan dan kenyamanan															

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				2018	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitasantar wilayah																					
12	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Mewujudkan penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan		1.03.24.04	- Penyusunan Program Pengembagan RTH	Tersedianya ruang terbuka hijau yang layak dan sesuai dengan 8 atribut kota hijau	-	1 Dok	167	1 keg	300	1 keg	350	1 keg	400	1 keg	450	1 keg	1.667	Tata Ruang	Kec. MaritengngaE
				1.03.24.06	- Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan taman kota, trotoar, pot bunga dan open space sebagai sarana publik yang segar, indah dan bersih	8 lokasi	8 lokasi	1.355	8 lokasi	1.100	8 lokasi	1.800	8 lokasi	2.000	8 lokasi	3.300	8 lokasi	9.555	Seksi Pertamanan	Kec. MaritengngaE
				1.04.20	PENGLOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Ratio TPU per satuan penduduk															
				1.04.20.0609	Pengelolaan Areal Pemakam	Jumlah areal pemakam yg tertata	-	-	-	1 lokasi	200	1 lokasi	220	1 lokasi	240	1 lokasi	260	1 lokasi	920	Seksi Pertamanan	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				2018	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitasantar wilayah																					
13	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman dan sanitasi air bersih yang berkualitas		1.05.17	PENGENDALIAN Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang															
				1.0517.01	- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Perda Fasum Perumahan & Permukiman	-	1 perda	71,09	-	-	-	-	-	-	-	1 perda	71,09	Tata Ruang		
				1.05.17.07	- Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya pengendalian penataan ruang sesuai aturan yang berlaku	11 kec	-	-	11 kec	100	11 kec	125	11 kec	150	11 kec	175	11 kec	550	Tata Ruang	
				1.03.17.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan hasil monitoring & evaluasi pemanfaatan ruang	11 kec	11 kec	81,997	11 kec	160	11 kec	100	11 kec	125	11 kec	150	11 kec	616,997	Tata Ruang	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				2018	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
<b>Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah</b>																					
14	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman dan sanitasi air bersih yang berkualitas		1.03.31	PERENCANAAN, PENGAWASAN, PENGUJIAN & PENGELOMPOKAN MUTU	Jumlah Dokumen perencanaan keciptaan karya															
				1.03.31.01	- Survey dan Desain	Tersusunnya perencanaan pemb. infrastruktur permukiman yg sesuai dgn usulan musrenbang	1 Dok. Master Plan Drainase	3 Dok	335,564	3 Dok.	564	6 Dok	525	6 Dok	530	6 Dok	425	24 Dok	2.379,564	Perumahan	
				1.05.17.07	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi infrastruktur permukiman berlaku	11 kec	-	-	2 Dok	50	3 Dok	50	3 Dok	50	3 Dok	50	11 kec	200	Perumahan	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				2018	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitasantar wilayah																					
15	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur			1.03.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran															
				1.03.01.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telepon listrik dan air setiap bulan	100%	12 bulan	96,4	12 bulan	96,4	12 bulan	96,4	12 bulan	96,4	12 bulan	482	Sekretariat			
				1.03.01.05	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya premi asuransi kendaraan dinas	3 unit	4 unit	20	4 unit	20	5 unit	25	5 unit	25	5 unit	115	Sekretariat			



Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah																					
16	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur			1.03.01.06	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya STNK Kendaraan Dinas	45 Unit	48	61,6	52	72,6	53	75	54	75	54	75	54	359,2	Sekretariat	
				1.03.01.07	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor petugas adm. keuangan	100%	12 bulan	169,23	12 bulan	197,183	12 bulan	200	12 bulan	200	12 bulan	200	12 bulan	966,413	Sekretariat	
				1.03.01.08	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	100%	12 bulan	33,059	12 bulan	22,585	12 bulan	35	12 bulan	35	12 bulan	35	12 bulan	160,644	Sekretariat	
				1.03.01.12	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	100%	12 bulan	4,845	12 bulan	3,060	12 bulan	5	12 bulan	5	12 bulan	5	12 bulan	22,905	Sekretariat	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah</b>																					
17	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur			1.03.01.14	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100%	12 bulan	3,450	12 bulan	0	12 bulan	3	12 bulan	3	12 bulan	3	12 bulan	12,450	Sekretariat	
				1.03.01.15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya biaya bahan bacaan	100%	12 bulan	19,200	12 bulan	0	12 bulan	8	12 bulan	8	12 bulan	8	12 bulan	43,200	Sekretariat	
				1.03.01.18	- Rapat-2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya rapat koordinasi keluar daerah	100%	12 bulan	100,100	12 bulan	131,200	12 bulan	150	12 bulan	150	12 bulan	150	12 bulan	681,300	Sekretariat	
				1.03.01.19	- Rapat-rapat koord & konsultasi Dalam daerah	Terbayarnya rapat koordinasi dalam daerah	100%	12 bulan	17	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	77	Sekretariat	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				2018	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitasantar wilayah																					
18	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur			1.03.01.20	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kelengkapan administrasi	100%	12 bulan	361,928	12 bulan	400	12 bulan	400	12 bulan	410	12 bulan	420	12 bulan	1.991,92	Sekretariat	
				1.03.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sarana dan pemeliharaan prasarana aparatur															
				1.03.02.03	- Pembangunan Gedung Kantor	Terciptanya gedung dan halaman yang asri dan nyaman	100%	1 keg.	61	1 keg.	2,858	1 keg.	150	1 keg.	150	1 keg.	150	1 keg.	769	Sekretariat	
				1.03.02.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional	0	-	-	1 unit	270	2 unit	450	2 unit	50	1 unit	30	6 unit	800	Sekretariat	
				1.03.02.07	-Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	1 keg	27,8	1 keg.	4,75	1 keg.	15	1 keg.	15	1 keg.	15	1 keg	77,55	Sekretariat	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitasantar wilayah</b>																					
19	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur			1.03.02.09	- Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung	100%	1 keg.	73,3	1 keg.	60	1 keg.	43	1 keg.	50	1 keg.	45	1 keg.	271,3	Sekretariat	
				1.03.02.10	- Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	100%	1 keg	42,37	1 keg.	15	1 keg.	30	1 keg.	15	1 keg.	30	1 keg	132,37	Sekretariat	
				1.03.02.12	- Pembangunan Gedung Kantor (Per mukiman)	Tercapainya pembangunan gedung yang lebih baik dan bermanfaat	100%	1 keg	16.200	1 keg.	14.000	1 keg.	15.000	1 keg.	15.500	1 keg.	15.000	1 keg.	75.700	Permukiman	
				1.03.02.22	-Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	1 keg	40,5	1 keg.	52,5	1 keg.	40	1 keg.	45	1 keg.	50	1 keg	228	Sekretariat	
				1.03.02.23	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	100%	1 keg	24,49	1 keg.	21	1 keg.	25	1 keg.	25	1 keg.	26	1 keg	121,49	Sekretariat	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah																					
20	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur			1.03.02.24	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharaan ya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	1 keg.	85,035	1 keg.	80	1 keg.	80	1 keg.	80	1 keg.	80	1 keg.	405,035	Sekretariat	
				1.03.02.26	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharaan ya perlengkapan gedung Kantor	100%	1 keg.	6,3	1 keg.	7,5	1 keg.	10	1 keg.	10	1 keg.	10	1 keg.	43,8	Sekretariat	
				1.03.02.28	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharaan ya peralatan gedung Kantor	100%	1 keg.	22,26	1 keg.	24	1 keg.	25	1 keg.	25	1 keg.	25	1 keg.	121,26	Sekretariat	
				1.03.02.29	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharaan ya Mebeleur	100%	1 keg.	3	-	0	1 keg.	5	1 keg.	5	1 keg.	5	1 keg.	18	Sekretariat	

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				2018	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah																					
21	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur			1.03.05	- PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan Pen dayagunaan Sumber Daya Aparatur pemerintah yang berkesinambungan															
				1.03.05.05	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Daerah	Tersedianya Sumber daya aparatur yg memiliki sertifikat keahlian		-	-	10 org	30	10 org	30	10 org	30	10 org	30	40 org	120	Sekretariat	
				1.03.06	PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CA PAIAN KINERJA & KEUANGAN	Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel															

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		2018			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitasantar wilayah</b>																					
22	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur			1.03.06.01	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Laporan Lakip, LKPJ, Renja, RKA dan DPA beserta perubahannya	100%	7 Laporan	35,775	7 Laporan	36	7 Laporan	36	7 Laporan	37	7 Laporan	37	7 Laporan	181,775	Sekretariat	
				1.03.06.01	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan bulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun	100%	12 Laporan	16,425	12 Laporan	27	12 Laporan	35	12 Laporan	37	12 Laporan	40	12 Laporan	155,425	Sekretariat	
				1.03.15	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data Data Pembangunan Kecipta karya															

Tabel 5.2 Matriks Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014-2018 (lanjutan)

Rp.dalam jutaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				2018	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
<b>Pengembangan Infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah</b>																					
23	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur			1.03.15.10	-Pembangunan Data / Informasi	Jumlah data dan Informasi pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan	2 Dok.	2 Dok	170,185	2 Dok	100	2 Dok	100	2 Dok	100	2 Dok	100	10 Dok	570,185	Sekretariat	
				1.20.17	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terciptanya pengelolaan keuangan yang berkualitas, efektif, efisien dan transparan															
				1.20.17.01	-Insentif PAD	Tersedianya dana insentif untuk petugas PAD	2,33%	1,66 %	51,482	1,68 %	55,531	1,7 %	60,035	1,3%	64,539	1,12%	69,493	1,12 %	301,08	Tata Ruang & Kebersihan	



## **BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 terlihat lebih rinci pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Targt Capaian Tahun ke-					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	11 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	28 Dokumen
2	Ratio Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Pembangunan Daerah	0,75 %	2 lokasi (%)	1 lokasi (%)	2 lokasi (%)	1 lokasi (%)	2 lokasi (%)	8 lokasi (20%)

3	Tersedianya sistem informasi Tata Ruang	0	-	1 program	-	-	-	1 program
4	Tersedianya RTH yang layak dan sesuai dengan atribut kota hijau	0	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen
5	Pelayanan bencana kebakaran di Kab. Sidenreng Rappang	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	10 – 45 menit	10 – 45 menit	10 – 45 menit	10 – 45 menit	10 – 45 menit	10 – 45 menit	10 – 45 menit
7	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang	0	1	1	1	1	1	5

	memenuhi standar kualifikasi							
8	Jumlah mobil pemadam kebakaran	6 unit	7 unit	7 unit	7 unit	8 unit	8 unit	8 unit
9	Persentase Rumah Tangga bersanitasi	83,73%	83,90%	84,14%	84,97%	85,25%	86,97%	86,97%
10	Ratio rumah layak huni yang dibangun	20,93%	22,45%	24,87%	25,34%	27,45%	27,45%	27,45%
11	Jumlah sarana dan prasarana air minum dan sanitasi	12%	17%	19%	23%	26%	30%	30%
12	Luas genangan akibat banjir musiman	32,4%	31,45%	30,47%	28,38%	27,04%	25,32%	25,32%

## **BAB 7 PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014-2018 merupakan acuan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyusun Program dan Kegiatan yang terarah dan sistematis dalam 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2018, yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

